

Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022

Nicodemus Christian Aribowo¹, Amanda Yulia Damayanti², Risma Wira Bharata³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tidar

nicodemuschristian22@gmail.com

Abstract

Debt management is a complex process in managing the finances of a local government that requires analysis of its financial performance risks. The aim of this study is to evaluate the financial performance risks in the Magelang City Local Government and analyze the debt management practices used by the Magelang City Local Government. This study used a descriptive analysis method to determine the debt management analysis used to assess the financial performance risks of the Magelang City Local Government. The results of the study indicate that the effectiveness ratio is categorized as effective, the efficiency ratio is categorized as less efficient, the independence ratio is still low, the activity ratio has increased, and the growth ratio is categorized as having increased. This study is expected to contribute to the Magelang City Local Government in providing information to relevant parties who need the results of this study as an indicator in decision making.

Keywords: *Debt Management, Performance Risk, Financial Ratios*

Abstrak

Manajemen utang merupakan suatu proses yang kompleks dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang memerlukan analisis terhadap risiko kinerja keuangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi risiko kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kota Magelang dan menganalisis manajemen utang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui analisis manajemen utang yang digunakan untuk menilai risiko kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dikategorikan sebagai efektif, rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien, rasio kemandirian masih rendah, rasio aktivitas mengalami peningkatan, dan rasio pertumbuhan dikategorikan mengalami peningkatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kota Magelang dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini sebagai indikator dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Manajemen utang, Risiko Kinerja, Rasio Keuangan

Tanggal Submit : 17 Maret 2023

Tanggal Revisi : 29 Maret 2023

Tanggal Publish : 31 Maret 2023

Sitasi APA :

Christian Aribowo, N., Yulia Damayanti, A. ., & Wira Bharata, R. . Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 57–65. <https://doi.org/10.36815/prive.v6i1.2569>

PENDAHULUAN

Di Indonesia pada saat ini terutama dalam sektor pemerintahan, banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan dan dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka yang panjang sehingga dengan adanya hal ini, mendorong kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah pengadaan proyek-proyek besar infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, bandara, dan proyek yang dapat mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat untuk kedepannya Hery Susanto (2019). Kemampuan dan potensi daerah yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan hutang dalam proses pembangunannya. Pemerintah dan perusahaan yang terkait harus memperhatikan bahwa hutang yang digunakan bisa dibayar kembali dan tidak melulu bergantung pada utang. Manajemen utang adalah suatu proses yang kompleks dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari manajemen utang sendiri adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik, serta meminimalkan risiko keuangan dan memaksimalkan kinerja keuangan. Manajemen utang menjadi penting untuk pemerintah karena pemerintah terlebih bagian daerah seringkali harus meminjam uang untuk membiayai proyek-proyek penting. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kota Magelang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Magelang harus mengelola keuangan dengan baik, termasuk dalam hal manajemen utang. Manajemen utang yang buruk dapat menyebabkan risiko kinerja keuangan yang tinggi, seperti defisit anggaran dan penurunan kualitas layanan publik.

Menurut kamus akuntansi manajemen, prestasi berarti selaku semacam kegiatan yang teratur dari sebuah entitas sepanjang kurun waktu terpilih selaku pengukuran keberhasilan sebuah karier. Pengukuran prestasi finansial dalam wilayah mempunyai tujuan buat memperhitungkan akuntabilitas serta efektifitas manajemen perhitungan sehubungan dengan jasa khalayak. Dalam prestasi finansial negeri wilayah, tingkatan peranguhan dalam hasil operasi di segi finansial negeri wilayah mencakup tasamuh serta honorarium wilayah dengan memakai sistem yang sudah ditetapkan via sebuah peraturan ataupun garis perundang-undangan sepanjang satu kurun waktu perhitungan. Menurut Kuncoro dan Machfud (2020) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat krusial karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, analisis ini juga dapat menjadi indikator dalam menilai kualitas pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, serta memberikan informasi penting bagi masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis manajemen utang sebagai sarana untuk menilai risiko kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat memahami risiko utang yang terjadi dan kemampuan untuk membayar kembali utangnya, serta mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangannya.

Menurut penelitian terdahulu oleh Ahmad et al. (2022) rasio utang terhadap PDB pemerintah Kota Magelang pada tahun 2021 mencapai 60% melebihi maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya risiko defisit anggaran dan ketidakmampuan Pemerintah Kota Magelang membayar kembali utang di masa depan. Selain itu pada tahun 2021, pemerintah daerah Kota Magelang menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangannya. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang mempengaruhi pendapatan daerah dan menambah beban belanja untuk penanganan pandemi. Selain itu, proyek besar yang harus diselesaikan menambah beban utang pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penulis mengambil judul penelitian “Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022”. Penelitian ini akan dikaji dengan berfokus pada pengelolaan kewajiban untuk menilai risiko kinerja keuangan di Pemerintah Kota Magelang dan analisis manajemen utang pemerintah Kota Magelang. Hasil penelitian ini merupakan kontribusi pada pemerintah daerah Kota Magelang untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini sebagai indikator dalam pengambilan keputusan.

Tinjauan Literatur Manajemen Utang

Menurut Brigham dan Houston (2016) mengartikan manajemen utang sebagai suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pembiayaan, dan pengendalian utang perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajemen utang adalah proses pengelolaan dan pengendalian keuangan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola utang. Manajemen utang melibatkan pengelolaan aspek-aspek seperti pemilihan sumber utang yang tepat, pengukuran risiko, penilaian kemampuan membayar utang, dan pengelolaan utang yang baik. Dalam praktiknya, manajemen utang membutuhkan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta sistem pengendalian intern yang kuat untuk memastikan bahwa utang digunakan secara efisien dan efektif menurut Fitriyani dan Wibowo (2020).

Risiko Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2011), analisis kinerja keuangan merujuk pada evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berlaku. Kinerja perusahaan dapat diukur melalui aset analisis keuangan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menunjukkan seberapa baik atau buruk prestasi kerja perusahaan dalam periode tersebut.

Mahsun (2013), berpendapat bahwa pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu proses evaluasi kemajuan pekerjaan yang dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses tersebut meliputi informasi yang mengenai penggunaan sumber daya yang efisien dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan, kepuasan pelanggan, pencapaian hasil kegiatan yang telah direncanakan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dalam konteks ini, analisis rasio digunakan untuk memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membandingkan hasil kinerja dari satu periode dengan periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tren yang sedang terjadi. Selain itu, pengukuran juga dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan suatu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain yang memiliki potensi daerah yang relatif sama, sehingga dapat diketahui sejauh mana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah menetapkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus diimplementasikan dalam informasi akuntansi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Terdapat empat karakteristik kualitatif yang harus dipahami agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi standar kualitas yang dihadapkan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Karakteristik-karakteristik tersebut dianggap sebagai prasyarat normatif yang harus terpenuhi agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria kualitas yang diinginkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan selama satu tahun. Penyajian informasi keuangan bertujuan untuk memahami penggunaan operasional pemerintah daerah, memperhitungkan kondisi keuangan daerah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan, serta memastikan kepatuhan dan kesesuaian penyajian informasi dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

a. Jenis Penelitian

Teknik analisa yang digunakan pada riset ini merupakan teknik analisa deskriptif, yang berniat guna mengerti analisa manajemen pinjaman guna memperhitungkan resiko prestasi moneter negara wilayah Kota Magelang. Analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menguraikan bagaimana analisis manajemen utang terhadap risiko kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Magelang dengan menggunakan data primer yang berasal dari Biro Keuangan Satda Kota Magelang dan data sekunder dari Kantor Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Magelang. Data APBD Kota Magelang dari tahun 2021 hingga tahun 2022 digunakan sebagai informasi untuk penelitian ini.

c. Rasio yang digunakan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. **Rasio Efektifitas** yaitu Rasio ini menerangkan keterampilan negara wilayah dalam melaksanakan pendapatan yang direncanakan ketimbang dengan sasaran pemasukan asli wilayah yang pernah diresmikan. kepiawaian wilayah disebut efektif, kalau rasio efektifitas yang diraih minimum 100%. Makin tinggi, kian positif efektifitas pemerintah Kota Magelang.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang

Presentase Kinerja Keunagan	Kriteria
Kurang dari 60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%-100%	Efektif
Diatas 100%	Sangat Efektif

Sumber: Susanto, Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (2014)

2. **Rasio efisiensi** yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara besarnya belanja atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang dalam melakukan pemungutan pendapatan dianggap efisien apabila rasio efisiensi yang diperoleh kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah Kota Magelang.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
Diatas 100%	Tidak efisien

Sumber: Susanto, Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (2014)

3. **Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang** yaitu mencerminkan sejauh mana daerah bergantung pada sumber dana dari pihak eksternal. Semakin tinggi nilai rasio keandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pihak eksternal. Rasio kemandirian juga menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, yang tercermin dari tingkat pembayaran pajak dan retribusi daerah yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya nilai rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang

Presentase Kinerja Keunagan	Kriteria
Diatas 50%	Sangat baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup
20%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang
0%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Susanto, Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (2014)

4. **Rasio Aktifitas** yaitu rasio yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah Kota Magelang dalam memperhatikan penggunaan dana secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja, maka semakin sedikit dana yang tersedia untuk sarana dan prasarana masyarakat. Dengan demikian, rasio aktivitas ini memperlihatkan prioritas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kota Magelang.

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang

Presentase Kinerja Keunagan	Kriteria
Kurang dari 60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%_100%	Efektif
Diatas 100%	Sangat Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014)

5. **Rasio Pertumbuhan PAD** yaitu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan pemerintah daerah Kota Magelang dalam meningkatkan pencapaian keuangan di masa depan.

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

(Keterangan: Th = Tahun p = tahun yang dihitung, p-1 = tahun sebelumnya)

Tabel 5. Kriteria Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang

Presentase Kinerja Keunagan	Kriteria
Kurang dari 60%	Tidak Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
90%_100%	Efektif
Diatas 100%	Sangat Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Susanto (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dibahas mengenai bagaimana manajemen utang menilai risiko kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kota Magelang tahun 2021-2022 dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Kota Magelang dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Manajemen utang akan menilai risiko kinerja keuangan pemerintah Kota Magelang efektif jika rasio efektivitas mencapai minimal 1% atau 100%. Untuk menghitung rasio efektivitas dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 6. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 2021-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Presentase (%)
2022	Rp 377.312.169.372	Rp 326.375.068.556	1,16%
2021	Rp 375.378.465.373	Rp 361.937.105.587	1,04%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Dari tabel 6 diatas menunjukkan perkembangan rasio efektifitas Kota Magelang yang cukup baik. pada tahun 2021 rasio efektifitas sebesar 1,04% dimana realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,16% dimana realisasi penerimaan lebih besar dibanding dengan target penerimaannya. Berdasarkan hal tersebut manajemen utang terhadap risiko kinerja keuangan daerah Kota Magelang berjalan secara efektif.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi mencerminkan proporsi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang benar-bener diterima. Kinerja keuangan pemerintah Kota Magelang dianggap efisien jika persentase biaya tersebut kurang dari 1% atau dibawah 100%. Semakin rendah presentase tersebut, maka semakin kecil risiko kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. Perhitungan rasio efisiensi dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 7. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 2021-2022

Tahun	Belanja	Realisasi Penerimaan	Presentase (%)
2022	Rp 30.877.012.000	Rp 377.312.169.372	0,82%
2021	Rp 60.036.057.000	Rp 375.378.465.373	1,6%

Sumber: Target Belanja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

Dari tabel 7 diatas rasio efisiensi pada tahun 2021 sebesar 1,6% dan pada tahun 2022 sebesar 0,82%. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2021 manajemen utang terhadap risiko kinerja keuangan daerah Kota Magelang kurang efisien dengan rata-rata 2,42%. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen utang terhadap risiko keuangan daerah Kota

Magelang melakukan penghematan anggaran serta kurangnya skala prioritas terhadap pos-pos anggaran yang telah diberikan.

3. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin rendah persentasenya. Hal ini mengindikasikan tingkat kemandirian yang tinggi terhadap risiko kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang. Perhitungan risiko kemandirian dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 8. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 2021-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Presentase (%)
2022	Rp 377.142.463.383	Rp 65.305.783.377	1,53 %
2021	Rp 319.391.277.825	Rp 63.023.321.818	5,07 %

Sumber: Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)

Dari tabel 10 di atas kemandirian pemerintah daerah Kota Magelang dikategorikan rendah. Manajemen utang terhadap risiko kinerja keuangan daerah masih belum optimal. Situasi ini menampakkan apabila pemerintah Kota Magelang tengah mempunyai tingkatan ketergantungan yang relatif tinggi kepada penguasa Provinsi/Pusat, dan belum pas dapat memadai kepentingan wilayah sendiri.

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menerangkan prosedur wilayah Kota Magelang dalam memilih prioritas peruntukan gaji. Perhitungan rasio aktivitas sebagai berikut:

Tabel 9. Rasio Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 2021-2022

Tahun	APBD	Belanja Operasi	Presentase (%)
2022	Rp 908.537.809.929	Rp 800.342.057.449	0,88 %
2021	Rp 991.691.941.000	Rp 742.814.563.800	0,75 %

Sumber: Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 tahun 2020 dan No. 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Tabel 9 di atas, terlihat bahwa rasio aktivitas pada tahun 2021 mencapai 0,75% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,88%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah daerah Kota Magelang dalam mengalokasikan belanja secara optimal mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, sehingga dana yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana masyarakat cenderung semakin sedikit.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah Kota Magelang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi persentase Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Tabel 10. Pertumbuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang 2021-2022

Tahun	Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan PAD
2022	Rp 17.456.329.000	0,08 %
2021	-Rp 42.187.774.000	-0,16 %

Sumber: data diolah dari APBD Kota Magelang tahun 202-2022

Dari tabel 10 rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar -0,16% dan pada tahun 2022 sebesar 0,08%. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya peningkatan pertumbuhan kinerja keuangan di Kota Magelang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas kinerja keuangan daerah kota Magelang pada tahun anggaran 2021-2022 menunjukkan bahwa manajemen utang terhadap risiko kinerja keuangan daerah berjalan efektif dengan tingkat presentase sebesar 1,04% pada tahun 2021 dan sebesar 1,16% pada tahun 2022.
2. Efisiensi rasio kinerja keuangan daerah Kota Magelang tahun anggaran 2021-2022 menunjukkan bahwa kurang efisien dengan rata-rata 2,42%. Hal ini menggambarkan bahwa manajemen utang terhadap risiko keuangan daerah Kota Magelang melakukan penghematan anggaran serta kurangnya skala prioritas terhadap pos-pos anggaran yang telah diberikan.
3. Kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2021-2022 dikategorikan relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Magelang masih sangat bergantung pada pemerintah Provinsi/Pusat dan belum mampu memenuhi kepentingan wilayah sendiri secara memadai.
4. Aktivitas dalam manajemen utang terhadap kinerja keuangan daerah Kota Magelang memprioritaskan alokasi belanja secara optimal dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, sehingga dana yang dialokasikan untuk sarana prasarana masyarakat cenderung semakin kecil.
5. Pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2021-2022 menunjukkan rasio pertumbuhan sebesar -0,16% pada tahun 2021 dan 0,08% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan kinerja keuangan di Kota Magelang.

SARAN

1. Diperlukan perhatian kembali dari pemerintah daerah Kota Magelang untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dengan memperhatikan manajemen utang.
2. Dibutuhkan usaha untuk menjaga efektivitas dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Magelang.
3. Perlu dilakukan optimalisasi pada sumber penerimaan daerah Kota Magelang dengan memanfaatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang masih tergolong signifikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, F., Widjaja, M., & Anwar, F. (2022). Analisis Manajemen Utang untuk Menilai Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 1-14.
- Anjelia, O., Tri Oldy R., & Ita Pingkan F. R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Daerah*. Vol. 22 No. 2. 74
- Darmawan, D., & Setiawan, B. (2020). Strategi Manajemen Utang dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 21(1), 115-128.

- Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4 ISSN 2303-1174, Hal. 2088-2096
- Hadiwijaya, A., & Laksmana, I. (2019). Analisis Rasio Utang dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 20(2), 209-218.
- Hasmayati, Veronika Yuni T., Siti H., Suyadi. (2022). Analisa Perbandingan Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Hospitality 1011*. Vol. 11 No.2
- Idna Hadi, Husnul Khotimah (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Jawa Dan Sumatera. *Trilogi Accounting and Business Research*. Vol. 03, No. 02, Desember 2022, Hal. 213-222
- Kota Magelang. 2019. *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. Pemerintah Kota Magelang: Magelang.
- Kota Magelang. 2020. *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. Pemerintah Kota Magelang: Magelang.
- Kota Magelang. 2021. *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Kota Magelang: Magelang.
- Sardio Kartopawiro, & Yohanes Susanto. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol. 16 (1), 2018